

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Paradigma pengelolaan keuangan daerah telah mengalami perubahan yang sangat mendasar sejak ditetapkannya otonomi daerah pada tahun 2001. UU No. 33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah menjadi landasan utama dalam melaksanakan otonomi daerah pada hakekatnya memberikan peluang yang lebih besar kepada daerah untuk lebih mengoptimalkan potensi yang dimiliki daerah, baik menyangkut sumber daya manusia, dana, maupun sumber daya lain yang merupakan kekayaan daerah (Rochmah, 2015).

Pengelolaan dan pertanggungjawab keuangan daerah telah ditetapkan pada Peraturan Pemerintah Pasal 4 No.105 Tahun 2000 yang menegaskan bahwa pengelolaan keuangan daerah harus dilakukan secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, efisien, efektif, transparan, dan bertanggungjawab dengan memperhatikan atas keadilan dan kepatuhan. Apabila pengelolaan keuangan daerah dilakukan dengan baik sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan, maka tentunya akan meningkatkan kinerja pemerintah itu sendiri (Rochmah, 2015).

Pasal 157 Undang-Undang No 32 Tahun 2004 tentang fungsi pemerintah daerah sebagai perangkat yang mengatur, menjalankan dan menyelenggarakan suatu pemerintahan di wilayahnya dibawa pemerintah pusat menyebutkan bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) terdiri atas : (1) hasil pajak daerah, (2) hasil

retribusi daerah, (3) hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan (4) lain-lain PAD yang sah. Sumber keuangan yang berasal dari PAD lebih penting dibanding dengan sumber yang berasal dari luar PAD karena PAD dapat dipergunakan sesuai dengan kehendak dan inisiatif pemerintah daerah demi kelancaran penyelenggaraan urusan daerahnya, sementara sumber keuangan yang berasal dari bantuan pemerintah pusat, umumnya sudah ditentukan untuk pembiayaan tertentu yang sifatnya mengikat. Kemampuan suatu daerah menggali PAD akan mempengaruhi perkembangan dan pembangunan suatu daerah. Penelitian Dian Batubara mengatakan bahwa semakin besar kontribusi PAD terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), maka akan semakin kecil pula ketergantungan terhadap bantuan pemerintah pusat (Batubara, 2009).

PAD merupakan tulang punggung pembiayaan daerah, karena PAD paling berkontribusi untuk pembangunan daerah dan kesejahteraan masyarakat daerah tersebut. Oleh sebab itu, kemampuan suatu daerah menggali PAD akan mempengaruhi perkembangan dan pembangunan daerah tersebut termasuk wilayah. Semakin besar kontribusi PAD terhadap APBD, maka akan semakin kecil pulaketergantungan terhadap bantuan pemerintah pusat, sehingga semakin tinggi penerimaan PAD akan memaksimalkan pemerintah daerah dalam pembangunan pemerintahan daerah yang berprinsip otonomi daerah yang nantinya akan berdampak pada kinerja keuangan pemerintah daerah yang semakin baik. Pernyataan tersebut sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Antari (2018) yang menyatakan bahwa peningkatan PAD dapat menyebabkan terjadinya peningkatan kemampuan pemerintah daerah untuk membiayai sendiri

segala kegiatan daerahnya sehingga memberikan indikasi bahwa pemerintah daerah telah memiliki kinerja yang baik (Putri & Darmayanti, 2019).

Menurut Standar Akuntansi Pemerintah (SAP), pengertian belanja modal adalah pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pembentukan modal yang sifatnya menambah aset tetap/inventaris yang memberikan manfaat lebih dari satu periode akuntansi, termasuk di dalamnya adalah pengeluaran untuk biaya pemeliharaan yang sifatnya mempertahankan atau menambah masa manfaat, serta meningkatkan kapasitas dan kualitas aset. Dalam SAP, belanja modal dapat diategorikan ke dalam 5 (lima) kategori utama, yaitu: (1) belanja modal tanah; (2) belanja modal peralatan dan mesin; (3) belanja modal gedung dan bangunan; (4) belanja modal jalan, irigasi, dan jaringan; dan (5) belanja modal fisik lainnya (Jauhar, 2016).

Belanja Modal merupakan pengeluaran yang bisa disebut dengan *expenditure* yang terdiri belanja rutin atau belanja operasional pemerintah daerah dalam suatu periode tertentu. Belanja tersebut dipergunakan untuk memberikan pelayanan publik sebaik-baiknya. Semakin baik pelayanan publik yang diberikan, menunjukkan semakin baik pengelolaan pembelanjaan pemerintah daerah. Pengelolaan pembelanjaan yang baik menciptakan *value for money* yang baik, sehingga penilaian akan Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah menjadi baik pula (Pratiwi, 2018).

Perkembangan pesat pembangunan dan penambahan aset diharapkan terjadi peningkatan kemandirian daerah dalam membiayai kegiatannya terutama dalam hal keuangan serta meningkatkan modal bagi kinerja pemerintah daerah

yang berdampak pada semakin meningkatnya Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah. Peningkatan capaian dari suatu hasil kerja dibidang keuangan daerah yang meliputi anggaran dan realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Belanja Modal dengan menggunakan indikator keuangan yang ditetapkan melalui suatu kebijakan atau ketentuan perundang-undangan dari satu periode anggaran ke periode anggaran berikutnya (Pratiwi, 2018).

Penilaian Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah dilakukan dengan menggunakan analisis rasio terhadap APBD. Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah selama masa otonomi dengan menggunakan Rasio Kemandirian, Rasio Efisiensi dan Rasio Efektivitas. Hasil dari perhitungan analisis rasio yang dilakukan pada APBD, selanjutnya dapat digunakan sebagai pedoman pengukuran untuk menilai Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah suatu daerah dalam hal pengelolaan sumber daya keuangan. Pemerintah daerah sebagai pihak yang diberikan tugas menjalankan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat wajib melaporkan pertanggungjawaban keuangan daerah sebagai dasar penilaian kinerja keuangannya (Pratiwi, 2018).

Pelaksanaan Otonomi Daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, memberi kewenangan daerah menyusun Struktur Organisasi Perangkat Daerah kebutuhan karakteristik

dan potensi yang dimiliki daerah, sehingga dengan kewenangan yang dimilikinya, daerah dapat dan mampu merespon dinamika yang ada dalam masyarakat lebih baik.

Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Palopo dibentuk dengan pertimbangan agar pelaksanaan fungsi pengelolaan keuangan, penyelenggaraan penatausahaan keuangan serta pengelolaan asset daerah dapat dilaksanakan lebih optimal dengan mengacu pada seluruh potensi sumber daya yang terdapat di Kota Palopo. Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis tertarik melakukan penelitian dengan judul **Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Dan Belanja Modal Terhadap Kinerja Keuangan pemerintah daerah (Studi kasus Kantor BPKAD Kota Palopo)**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah penulis uraikan maka rumusan masalah yang ada dalam penelitian ini adalah .

1. Bagaimana pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah?
2. Bagaimana pengaruh Belanja Modal terhadap Kinerja Keuangan pemerintah daerah?
3. Bagaimana pengaruh pendapatan asli daerah dan belanja modal terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah, adapun tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah

1. Untuk mengetahui pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Kinerja keuangan pemerintah daerah.
2. Untuk mengetahui pengaruh Belanja Modal terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah.
3. Untuk mengetahui pengaruh pendapatan Asli Daerah dan Belanja Modal terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Teoritis

Bagi peneliti, penelitian ini digunakan sebagai sarana untuk menambah ilmu pengetahuan dan wawasan, terkait dengan pengaruh pendapatan asli daerah dan belanja modal terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan mahasiswa khususnya tentang pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Belanja Modal terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi salah satu referensi dan sumbangan konseptual bagi peneliti selanjutnya, serta dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan.

1.4.2 Manfaat Praktis

1. Bagi Instansi, penelitian ini di harapkan dapat memberikan saran dan masukan bagi pemerintah daerah terkait tentang pengaruh pendapatan asli daerah dan belanja modal terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah.
2. Bagi Akademisi, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan bagi akademisi dalam pengetahuan ilmu Akuntansi Pemerintahan khususnya dalam pengaruh pendapatan asli daerah (PAD) dan belanja modal terhadap kinerja keuangan.

1.5 Ruang Lingkup dan Batasan Penelitian

Kinerja keuangan pemerintah daerah merupakan kemampuan suatu daerah dalam menggali potensi keuangan daerah serta mengelola sumber-sumber keuangan asli daerah guna memenuhi kebutuhan pemerintah daerah agar tidak bergantung pada pembiayaan dari pemerintah pusat. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja keuangan pemerintah daerah tersebut diantaranya Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, Belanja Modal, Pertumbuhan Ekonomi, Ukuran Legislatif, Leverage, Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Khusus (DAK) sumber daya manusia dan kondisi makro ekonomi suatu daerah, pembiayaan daerah.

Namun karena keterbatasan waktu serta pengetahuan peneliti, sehingga dalam penelitian ini peneliti hanya akan membahas tentang pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Belanja Modal terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Teori Keagenan

Menurut Halim (2012), teori keagenan merupakan suatu hubungan yang terjalin berdasarkan kontrak perjanjian antara dua pihak atau lebih dimana pihak pertama disebut prinsipal dan pihak yang lainnya disebut dengan agen. Prinsipal merupakan pihak yang bertindak sebagai pemberi perintah dan bertugas untuk mengawasi, memberikan penilaian dan masukan atas tugas yang telah dijalankan oleh agen. Adapun agen adalah pihak yang menerima dan menjalankan tugas sesuai dengan kehendak prinsipal. (Verawaty et al., 2020)

Teori keagenan dapat diterapkan dalam organisasi publik. Model agen prinsipal merupakan kerangka analitik yang sangat berguna dalam menjelaskan masalah insentif dalam institusi publik dengan dua kemungkinan kondisi, yakni terdapat beberapa prinsipal dengan masing-masing tujuan dan kepentingan yang tidak koheren dan prinsipal juga bisa bertindak tidak sesuai dengan kepentingan masyarakat, tetapi mengutamakan kepentingan yang sifatnya lebih sempit. Hubungan keagenan dalam pemerintah dijalankan berdasarkan peraturan pemerintah daerah dan bukan semata-mata hanya untuk memenuhi kepentingan prinsipal saja (Verawaty et al., 2020).

Jika dikaitkan dengan kinerja keuangan daerah, pemerintah pusat merupakan prinsipal dimana pemerintah pusat adalah pihak yang bertindak sebagai pemberi perintah dan bertugas untuk mengawasi, memberikan penilaian

dan masukan atas tugas yang telah dijalankan oleh pemerintah daerah. Jika kinerja keuangan daerah yang dikelola oleh pemerintah daerah baik, kemampuan suatu daerah untuk mengelola sumber-sumber keuangan asli daerah guna memenuhi kebutuhannya juga akan tercukupi dan tidak bergantung sepenuhnya kepada pemerintah pusat.

2.1.2 Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan Asli Daerah dapat diartikan sebagai pendapatan yang bersumber dari pungutan-pungutan yang dilaksanakan oleh daerah berdasarkan peraturan-peraturan yang berlaku yang dapat dikenakan kepada setiap orang atau badan usaha baik milik pemerintah maupun swasta karena perolehan jasa yang diberikan oleh pemerintah tersebut. Oleh sebab itu daerah dapat melaksanakan pungutan dalam bentuk penerimaan pajak, retribusi, dan penerimaan lainnya yang sah yang diatur dalam undang-undang. Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) akan mengakibatkan peningkatan kinerja keuangan pemerintah (Prasasti & Sari, 2015).

Pendapatan daerah berasal dari penerimaan dana perimbangan pusat dan daerah, juga yang berasal daerah itu sendiri yaitu pendapatan asli daerah serta lainlain pendapatan yang sah. PAD (Pendapatan Asli Daerah) merupakan akumulasi dari Pos Penerimaan Pajak yang terdiri atas Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pos Penerimaan Non Pajak berupa penerimaan hasil Perusahaan Milik Daerah, serta pos penerimaan investasi serta pengelolaan sumber daya alam (Rochmah, 2015).

Menurut Halim (2007) Pendapatan asli daerah adalah penerimaan daerah yang diperoleh dari sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri yang dipungut

berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundangan-undangan yang berlaku.

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Pasal 3 ayat 1 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah dinyatakan bahwa PAD bertujuan memberikan kewenangan kepada Pemerintah Daerah untuk mendanai pelaksanaan otonomi daerah sesuai dengan potensi daerah sebagai perwujudan desentralisasi. Berdasarkan tujuan tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa PAD sebagai sumber utama pendapatan daerah semata-mata ditujukan untuk pelaksanaan pembangunan oleh Pemerintah Daerah agar hasil pembangunan dapat dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat. Artinya, semakin besar dana PAD yang diperoleh oleh daerah akan sebanding dengan laju pembangunan di daerah tersebut (Aprilianda, 2016).

2.1.3 Komponen Pendapatan Asli Daerah

Komponen-komponen dalam pendapatan asli daerah adalah sebagai berikut: (Yunus, 2019)

1. Pajak Daerah

Secara umum, pajak adalah pungutan dari masyarakat oleh negara (pemerintah) berdasarkan Undang-Undang yang bersifat dapat dipaksakan dan terutang oleh yang wajib membayarnya dengan tidak mendapat prestasi kembali (kontra prestasi/ balas jasa) secara langsung, yang hasilnya digunakan untuk membiayai pengeluaran dalam penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan.

2. Retribusi

Daerah Retribusi daerah sebagaimana halnya pajak daerah merupakan salah satu Pendapatan Asli Daerah yang diharapkan menjadi salah satu sumber pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah, untuk meningkatkan dan pemeratakan kesejahteraan masyarakat. Menurut Undang-Undang nomor 28 Tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah menyebutkan bahwa retribusi daerah yang selanjutnya disebut retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan atau diberikan pemerintah daerah untuk kepentingan pribadi atau golongan.

3. Perusahaan Milik Daerah

Menurut Halim (2004:68), “Hasil perusahaan milik Daerah dan hasil Pengelolaan kekayaan milik Daerah yang dipisahkan merupakan penerimaan Daerah yang berasal dari hasil perusahaan milik Daerah dan pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan”. Jenis pendapatan ini meliputi objek pendapatan berikut:

- a. Bagian laba Perusahaan milik Daerah
- b. Bagian laba lembaga keuangan Bank
- c. Bagian laba lembaga keuangan non Bank
- d. Bagian laba atas penyertaan modal atau investasi

4. Pendapatan Asli Daerah yang sah

Pendapatan daerah yang berasal dari lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah antara lain:

- a. Hasil penjualan aset daerah yang tidak dipisahkan
- b. Jasa giro

- c. Pendapatan bunga
- d. Tuntutan ganti rugi
- e. Komisi
- f. Potongan
- g. Keuntungan selisih kurs
- h. Pendapatan denda keterlambatan pelaksanaan pekerjaan
- i. Pendapatan denda pajak dan retribusi
- j. Pendapatan hasil eksekusi atas jaminan
- k. Pendapatan atas fasilitas sosial dan fasilitas umum

2.2 Belanja Modal

Belanja modal adalah komponen belanja langsung dalam anggaran pemerintah yang menghasilkan output berupa aset tetap. Dalam pemanfaatan aset tetap yang dihasilkan tersebut, ada yang bersinggungan langsung dengan pelayanan publik atau dipakai oleh masyarakat dan ada yang tidak langsung dimanfaatkan oleh publik. Dalam perspektif kebijakan publik, sebagian besar belanja modal berhubungan dengan pelayanan publik, sehingga pada setiap anggaran tahunan jumlahnya semestinya relatif besar (Abarca, 2021).

Menurut Halim dan Kusufi (2012:107) pengertian belanja modal adalah sebagai berikut: “Belanja modal merupakan pengeluaran untuk perolehan aset lainnya yang memberikan manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Belanja modal adalah semua pengeluaran dari rekening kas umum Negara/Daerah yang mengurangi saldo anggaran lebih dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah.

Dari definisi di atas dapat disimpulkan bahwa Belanja modal merupakan pengeluaran kas Negara yang mengurangi saldo anggaran yang memberikan masa manfaat lebih dari satu periode akuntansi.

2.2.1 Jenis-Jenis Belanja Modal

Jenis-jenis Belanja Modal adalah sebagai berikut :(Abarca, 2021)

1. Belanja Modal Tanah adalah pengeluaran/biaya yang digunakan untuk pengadaan/pembelian/pembebasan penyelesaian, balik nama dan sewa tanah, pengosongan, pengurangan, perataan, pematangan tanah, pembuatan sertipikat, dan pengeluaran lainnya sehubungan dengan perolehan hak atas tanah dan sampai tanah dimaksud dalam kondisi siap pakai.
2. Belanja Modal Peralatan dan Mesin adalah pengeluaran/biaya yang digunakan untuk pengadaan, penambahan, penggantian, dan peningkatan kapasitas peralatan dan mesin serta inventaris kantor yang memberikan manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan dan sampai peralatan dan mesin dimaksud dalam kondisi siap pakai.
3. Belanja Modal Gedung dan Bangunan adalah pengeluaran biaya yang digunakan untuk pengadaan/penambahan/penggantian, dan termasuk pengeluaran untuk perencanaan, pengawasan dan pengelolaan pembangunan gedung dan bangunan yang menambah kapasitas sampai gedung dan bangunan dimaksud dalam kondisi siap pakai. Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan adalah pengeluaran/biaya yang digunakan untuk pengadaan/ penambahan/ penggantian/ peningkatan pembangunan/ pembuatan serta perawatan, dan termasuk pengeluaran untuk perencanaan, pengawasan dan pengelolaan jalan irigasi dan jaringan yang

menambah kapasitas sampai jalan irigasi dan jaringan dimaksud dalam kondisi siap pakai.

4. Belanja Modal Fisik Lainnya adalah pengeluaran/biaya yang digunakan untuk pengadaan / penambahan / penggantian/ peningkatan pembangunan/ pembuatan serta perawatan terhadap fisik lainnya yang tidak dapat dikategorikan kedalam kriteria belanja modal tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, dan jalan irigasi dan jaringan, termasuk dalam belanja ini adalah belanja modal kontrak sewa beli, pembelian barang-barang kesenian, barang purbakala dan barang untuk museum, hewan ternak dan tanaman, buku-buku, dan jurnal ilmiah.

2.3 Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah

Kinerja keuangan pemerintah daerah adalah salah satu ukuran yang dapat digunakan untuk memastikan kemampuan daerah dalam melaksanakan aturan pelaksanaan keuangan secara baik dan benar untuk mempertahankan layanan yang diinginkan, di mana penilaian yang lebih tinggi menjadi tuntutan yang harus dipenuhi agar pihak eksternal memutuskan untuk berinvestasi di dalam daerah. Kinerja keuangan pemerintah daerah menjadi suatu hal yang penting bagi pemerintah daerah dan pihak eksternal. Peningkatan kinerja keuangan pemerintah daerah merupakan salah satu cara dalam meningkatkan rasio kemandirian dalam suatu pemerintah daerah. Salah satu pengukuran kinerja yang dapat menggambarkan kinerja pemerintah daerah adalah pengukuran kinerja keuangan (Dwi Saraswati, Yunita Sari Rioni 2019).

Menurut Halim (2004: 24) Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah merupakan salah satu ukuran yang dapat digunakan untuk melihat kemampuan

pemerintah daerah dalam menjalankan otonomi daerah sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku. Berdasarkan beberapa pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah adalah hasil dari pengukuran untuk melihat kondisi keseluruhan ketercapaian pengelolaan keuangan atau pelaksanaan suatu kegiatan/program/kebijakan dalam rangka mewujudkan visi dan misi pemerintah daerah. Salah satu informasi yang dapat digunakan sebagai tolok ukur kinerja adalah informasi keuangan.

1. Rasio Ekonomis

Ekonomis (kehematan) sebagai tingkat biaya yang dikeluarkan untuk melaksanakan suatu kegiatan atau memperoleh sesuatu. Tingkat ekonomi dalam mengelola keuangan dengan melihat perbandingan antara anggaran belanja dengan realisasinya dengan presentase tingkat pencapaiannya.

$$RasioEkonomis = \frac{\text{Realisasi Pengeluaran}}{\text{Anggaran Pengeluaran}} \times 100\%$$

2. Rasio Efisiensi

Efisiensi (daya guna) berhubungan dengan metode operasi (*method operation*). Proses kegiatan operasional dapat dikatakan efisien apabila suatu produk atau hasil karya tertentu mempergunakan sumber daya dan dana yang serendah-rendahnya. Efisiensi merupakan perbandingan antara *output* dan *input*. Tingkat efisiensi dalam mengelola keuangan dengan melihat perbandingan antara realisasi belanja dengan realisasi pendapatan.

$$Rasio Efisiensi = \frac{\text{Realisasi biaya untuk memperoleh pendapatan}}{\text{Realisasi pendapatan}} \times 100\%$$

3. Rasio Efektivitas

Efektivitas (hasil guna) adalah ukuran keberhasilan suatu organisasi dalam usaha mencapai tujuan organisasi yang telah ditetapkan. Efektivitas merupakan perbandingan *outcome* dan *output*. *Outcome* merupakan dampak suatu program atau kegiatan terhadap masyarakat, sedangkan *output* merupakan hasil yang dicapai dari suatu program aktivitas dan kebijakan. Tingkat efektivitas dalam pengelolaan keuangan dapat dilihat perbandingan realisasi pendapatan dengan anggaran pendapatan.

$$\text{Rasio Efektivitas} = \frac{\text{Realisasi pendapatan}}{\text{Anggaran pendapatan}} \times 100\%$$

2.4 Penelitian Terdahulu

Banyak penelitian terdahulu menjadi referensi dari penelitian ini. Di bawah ini ada beberapa penelitian yang terkait dan sesuai dengan penelitian yang diangkat oleh peneliti sekarang, di antaranya yang tercantum dalam tabel 2.1 adalah sebagai berikut:

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu

No	Nama Penulis	Judul Penelitian	Variabel Penelitian	Hasil Penelitian
1.	Sari and Mustanda (2019)	Pengaruh Ukuran Pemerintah Daerah, Pendapatan Asli Daerah dan Belanja Modal terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah	Ukuran Pemerintah Daerah (X1) Pendapatan Asli Daerah (X2) Dan Belanja Modal (X3) Kinerja Keuangan (Y)	ukuran pemerintah daerah berpengaruh negatif terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Hal ini menunjukkan bahwa ukuran pemerintah daerah yang diproksikan dengan total aset yang dimiliki

		Daerah		pemerintah daerah belum memberikan kontribusi terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Pendapatan asli daerah berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Hal ini menunjukkan semakin tinggi pendapatan asli daerah yang dihasilkan maka akan semakin tinggi pula kinerja keuangan pemerintah daerah. Dan belanja modal berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi belanja modal yang dilakukan pemerintah maka semakin tinggi pula kinerja keuangan pemerintah daerah
2.	Sukma and Panji (2018)	Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Belanja Modal terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah	Pendapatan Asli Daerah (X1) dan Belanja Modal (X2) Kinerja Keuangan (Y)	pendapatan asli daerah berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Belanja modal berpengaruh negatif signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Kabupaten/Kota

				Provinsi Bali tahun 2011-2015.
3.	Putri and Darmayanti (2019)	Pengaruh PAD dan Dana Perimbangan terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah di Wilayah Sarbagita Provinsi Bali	PAD (X1) Dana Perimbangan (X2) Kinerja keuangan (Y)	PAD dan dana perimbangan berpengaruh negatif signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Hasil ini menunjukkan bahwa semakin meningkatnya perolehan PAD dan penerimaan dana perimbangan akan diikuti dengan penurunan kinerja keuangan pemerintah daerah.
4.	Aprilianda (2016)	Analisis Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Kinerja Keuangan pada Pemerintah Kabupaten dan Kota Di Provinsi Jawa Timur	Pendapatan Asli Daerah (X1) Kinerja Keuangan (Y)	Pendapatan Asli Daerah (PAD) secara simultan memiliki pengaruh terhadap kinerja keuangan. Secara parsial pajak daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan PAD lain-lain yang sah berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan sedangkan retribusi daerah berpengaruh negative terhadap desentralisasi fiskal. Dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan yang paling dominan mempengaruhi kinerja

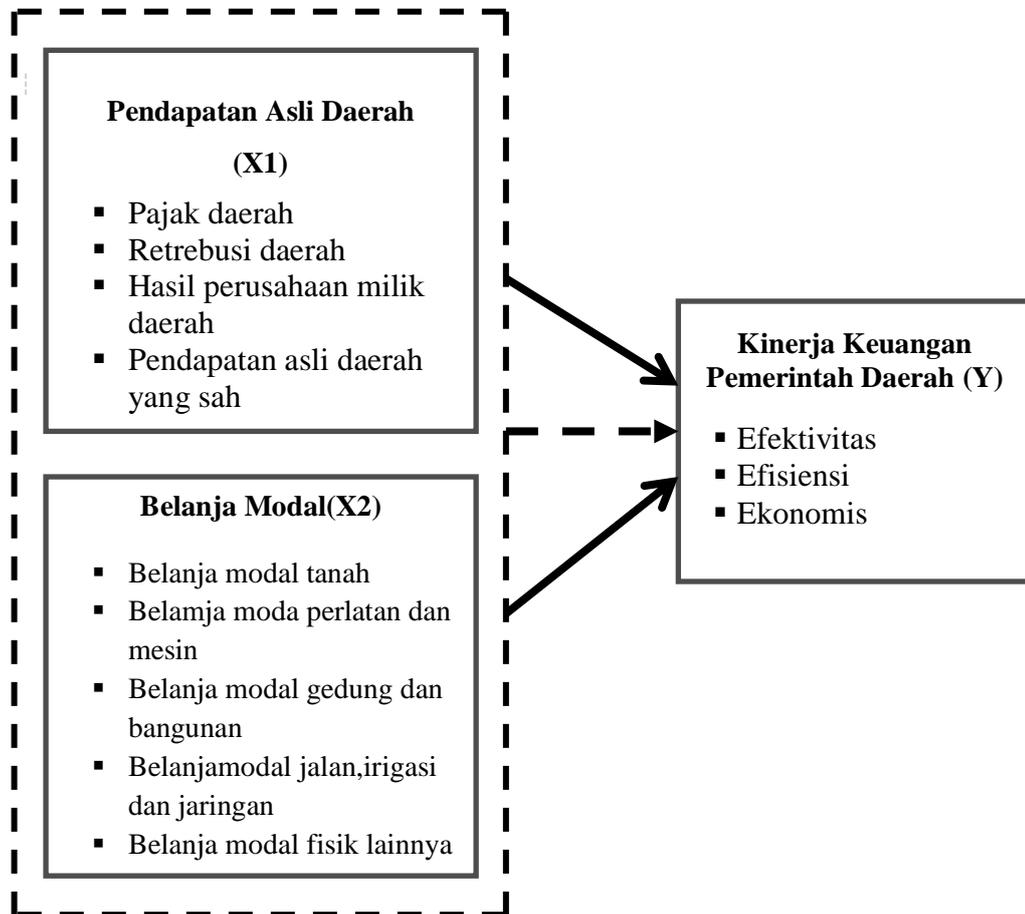
				keuangan.
5.	Abdullah, (2015)	Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Se-Sumatera Bagian Selatan	Pendapatan Asli Daerah (X1) Dana Alokasi Umum (X2) Dana Alokasi Khusus (X3) Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah (Y)	Pendapatan asli daerah (PAD) berpengaruh terhadap kinerja keuangan Pemerintah Kabupaten dan Kota se-Sumatera Bagian Selatan periode 2011-2013. Dana alokasi umum (DAU) tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan Pemerintah Kabupaten dan Kota se-Sumatera Bagian Selatan periode 2011-2013. Dana alokasi khusus (DAK) tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan Pemerintah Kabupaten dan Kota Sumatera Bagian Selatan periode.
6.	Dwi Saraswati, Yunita Sari Rioni (2019)	Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Ukuran Pemerintah Daerah, Leverage, terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah	Pendapatan Asli Daerah (X1) Ukuran Pemerintah Daerah (X2) Leverage (X3) Kinerja Keuangan (Y)	pendapatan asli daerah berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah sehingga hipotesis pertama diterima, ukuran pemerintah daerah tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah sehingga hipotesis kedua ditolak. leverage tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah

				daerah sehingga hipotesis ketiga ditolak.
7.	Prastiwi and Aji (2020)	Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, Dana Keistimewaan dan Belanja Modal Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Kasus pada Pemerintahan Daerah Kabupaten dan Kota di Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun Anggaran 2013-2018)	Pendapatan Asli Daerah (X1) Dana perimbangan (X2) Dana Keistimewaan (X3) dan Belanja Modal (X4) Kinerja keuangan pemerintah daerah (Y)	Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, Dana Keistimewaan, dan Belanja Modal secara bersama-sama berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2013-2018.

2.5 kerangka konseptual

Berdasarkan rumusan masalah dan landasan teori yang ada diatas, kerangka konseptual yang di gunakan dalam penelitian ini dalam merumuskan tentang pengaruh pendapatan asli daerah (PAD) dan belanja modal terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah Badan Pengelola Keuangan Aset Daerah sebagai berikut.

Gambar 2.1 Kerangka Konseptual



Keterangan :

: Variabel Penelitian dan Indikator Penelitian

→ : Garis pengaruh X1,X2 secara persial terhadap Y

- - → : Garis pengaruh X1,X2 secara simultan terhadap Y

2.6 Hipotesis

Berdasarkan uraian latar belakang, landasan teori dan kerangka konseptual yang telah ada, maka terbentuk hipotesis sebagai berikut:

Pendapatan Asli Daerah merupakan semua penerimaan yang berasal dari sumber ekonomi asli daerah yaitu Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil

Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan, dan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah. Semakin besar kontribusi Pendapatan Asli Daerah untuk membiayai pembangunan dan pelayanan masyarakat maka dapat dikatakan ada peningkatan Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah. Jika Pendapatan Asli Daerah naik maka dapat dikatakan Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah naik(meningkat).

H₁ :Pendapatan Asli Daerah berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan pemerintah Daerah.

Belanja Modal yang dikeluarkan pemerintah daerah merupakan investasi daerah dalam rangka memberikan pelayanan kepada masyarakat yang manfaatnya baik secara langsung maupun tidak langsung dapat dirasakan oleh masyarakat. Pemerintah akan melakukan pembangunan infrastruktur serta sarana dan prasarana yang diperlukan oleh negara, yang tercermin di dalam Belanja Modal yang dilakukan oleh pemerintah. Belanja Modal yang besar merupakan cerminan banyaknya infratraktur dan sarana yang dibangun. Semakin banyak pembangunan yang dilakukan akan meningkatkan Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah, sesuai dengan logika, semakin banyak sumber yang dihasilkan, maka hasilnya pun akan semakin banyak.

H₂ :Belanja Modal berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah.

H₃ :Pendapatan Asli Daerah dan Belanja Modal berpengaruh positif terhadap KinerjaKeuangan pemerintah Daerah

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Desain Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan metode kuantitatif. Pembahasan mengacu pada data-data yang diperoleh, yang kemudian dipaparkan secara sistematis dan faktual.

3.2 Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Kantor Badan Pengelola Keuangan Aset Daerah (BPKAD) Kota Palopo, Jl. Jend. Sudirman No.163, Binturu, Wara Sel., Kota Palopo, Sulawesi Selatan. Adapun waktu yang digunakan dalam penelitian ini adalah tiga bulan terhitung dari bulan Maret sampai pada bulan Mei 2022.

3.3 Sampel

Menurut (Sugiyono, 2018: 118) sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Berdasarkan penelitian diatas maka yang menjadi sampel penelitian yaitu data laporan realisasi APBD dikantor Badan pengelola Keuangan Aset Daerah (BPKAD) Kota Palopo selama kurun waktu 10 tahun, yaitu dari tahun 2011 sampai dengan tahun 2020.

3.4 Jenis dan Sumber Data

3.4.1 Jenis Data

Jenis data dalam penelitian ini jenis data yang digunakan adalah data kuantitatif, jenis data kuantitatif berupa data laporan realisasi APBD.

3.4.2 Sumber Data

Data Sekunder

Data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari pihak lain atau sumber lain yang berkaitan dengan penelitian ini yang sudah diolah dan didapatkan melalui dokumen-dokumen yang telah tersedia.

3.5 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu dengan dokumen dan menghitung data-data yang berhubungan dengan penelitian yang bersumber dari instansi terkait yaitu Badan Pengelola Keuangan Aset Daerah (BPKAD) Kota Palopo yang sesuai berdasarkan kebutuhan penelitian.

3.6 Variabel Penelitian dan Definisi Operasional Variabel

Definisi operasional menjelaskan bagaimana menemukan dan mengukur variabel-variabel yang diteliti dengan menemukannya secara singkat dan jelas. Berikut adalah definisi operasional variabel-variabel dalam penelitian.

3.6.1 Variabel Penelitian

Variabel Penelitian adalah suatu atribut atau sifat atau nilai dari orang, objek atau kegiatan mempunyai variasi tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Variabel penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Variabel Bebas atau Independen

Menurut Sugiyono, (2018: 55) Variabel Independen merupakan variabel yang mempengaruhi atau menjadi sebab perubahannya atau timbulnya variabel dependen. Dalam penelitian ini yang menjadi variabel bebas adalah Pendapatan Asli Daerah (X1) dan Belanja Modal (X2).

2. Variabel Terikat atau Dependen

Menurut (Sugiyono, 2018: 56). Variabel Dependen merupakan variabel yang dipengaruhi atau menjadi akibat, karena adanya variabel bebas. Dalam penelitian ini yang menjadi variabel terikat atau dependen adalah Kinerja keuangan pemerintah.

3.6.2 Definisi Operasional

Tabel 3.1
Definisi Operasional

No	Variabel	Definisi Variabel	Indikator
1.	Pendapatan asli daerah	Pendapatan asli daerah adalah penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber dalam wilayahnya yang sendiri yang dipungut berdasarkan undang-undang.	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Pajak daerah ▪ Retribusi daerah ▪ Hasil perusahaan milik daerah ▪ Pendapatan asli daerah yang sah
2.	Belanja modal	Belanja modal merupakan belanja pemerintah yang	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Belanja modal tanah ▪ Belanja modal

		mampu memberikan kontribusi terhadap pertumbuhan pendapatan daerah.	<p>peralatan dan mesin</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Belanja modal gedung dan bangunan ▪ Belanja modal jalan, irigasi dan jaringan ▪ Belanja modal fisik lainnya
3.	Kinerja keuangan pemerintah	Kinerja keuangan adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian pengelolaan keuangan atas pelaksanaan suatu kegiatan program kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, visi dan misi.	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Efektivitas ▪ Efisiensi ▪ Ekonomis

3.7 Analisis Data

3.7.1 Analisis Statistik Deskriptif

Analisis statistik deskriptif bertujuan untuk memberikan gambaran mengenai variabel-variabel dalam penelitian. Statistik deskriptif memberikan gambaran atau deskripsi suatu data dilihat dari nilai rata-rata, standar deviasi, varians, maksimum, minimum, sum, range, kurtosis, dan skewness (Ghozali, 2011: 19).

3.7.2 Uji Asumsi Klasik

1. Uji Multikolinieritas

Uji Multikolinieritas bertujuan untuk menguji apakah dalam regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas (independen). Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi diantara variabel independen. (Ghozali, 2011:105). Untuk mendeteksi ada atau tidaknya multikolinieritas di dalam model regresi dapat dilihat dari besarnya nilai Tolerance dan VIF-nya (Variance Inflation Factor). Regresi bebas dari masalah Multikolinieritas jika nilai Tolerance lebih dari 10 persen (0,10) dan nilai VIF kurang dari 10,00. (Ghozali, 2011:106)

2. Uji Autokorelasi

Uji Autokorelasi bertujuan untuk menguji apakah dalam suatu model regresi linier ada korelasi antara kesalahan pengganggu periode t dengan kesalahan pengganggu pada periode $t-1$. Model regresi yang baik, tidak terjadi autokorelasi. Autokorelasi dalam regresi linier dapat mengganggu suatu model, dimana akan menyebabkan terjadinya kebiasaan pada kesimpulan yang diambil.

3. Uji Heteroskedastisitas

Uji Heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Jika variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain tetap, maka disebut homokedastisitas dan jika berbeda disebut heteroskedastisitas. Model regresi yang baik adalah model regresi yang homokedastisitas atau tidak terjadi heterokedastisitas. (Ghozali, 2011:139)

3.7.3 Uji Hipotesis

1. Analisis Regresi Linear Berganda

Analisis regresi linier berganda pada penelitian ini digunakan untuk mengetahui kinerja keuangan pemerintah daerah. Berdasarkan hal ini maka formulasi persamaan regresi linier berganda pada penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \epsilon_i$$

Keterangan :

Y = Kinerja keuangan

α = konstanta regresi

β_1, β_2 = koefisien regresi variabel bebas

X1 = Pendapatan Asli Daerah (PAD)

X2 = Belanja modal (BM)

e = Tingkat kesalahan pengganggu (standar error)

2. Koefisien Korelasi Regresi Linier Berganda ($R^2_{\gamma(1,2)}$)

Persamaan dari koefisien korelasi linier berganda adalah sebagai berikut:

$$(R^2_{\gamma(1,2)}) = \frac{b_1 \sum X_1 Y + b_2 \sum X_2 Y + \dots}{b_3 \sum X_3 Y}$$

Keterangan:

$(R^2_{\gamma(1,2)})$ = Koefisien korelasi regresi berganda dengan tiga variabel independen.

b_1 = Koefisien regresi variabel Pendapatan Asli Daerah

b_2 = Koefisien regresi variabel Belanja Modal

X_1 = Variabel Pendapatan Asli Daerah

X_2 = Variabel Belanja Modal

Y = Variabel dependen

3. Koefisien Determinasi Regresi Linier Berganda ($R^2_{\gamma(1,2)}$)

Koefisien determinasi regresi linier berganda ($R^2_{\gamma(1,2)}$) mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen. Koefisien determinasi dapat menginterpretasikan sejauh mana keeratan hubungan antara linier berganda merupakan kuadrat dari koefisien korelasi berganda. Analisis regresi linear berganda menggunakan koefisien determinasi ($R^2_{\gamma(1,2)}$) untuk mengukur seberapa jauh kemampuan model regresi dalam menerangkan setiap variabel independen. Nilai koefisien determinasi ($R^2_{\gamma(1,2)}$) terletak antara 0 dan 1 ($0 \leq \leq 1$). Jika nilai koefisien determinasi atau ($R^2_{\gamma(1,2)}$) semakin mendekati 1 maka garis regresi atau persamaan regresi semakin baik dan jika nilai koefisien determinasi semakin mendekati 0 maka garis regresi atau persamaan regresi semakin kurang baik (Widarjono, 2010: 20). Semakin tinggi koefisien determinasi

maka akan semakin baik kemampuan variabel independen dalam menjelaskan variabel dependen. Semakin kecil nilai koefisien determinasi berarti kemampuan variabel independen dalam menjelaskan keterikatannya dengan variabel dependen terbatas. Jika nilai koefisien determinasi mendekati satu berarti variabel-variabel independen memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi variabel dependen.

4. Uji Parsial (Uji-t)

Uji t digunakan untuk mengetahui masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen. Uji parsial dalam penelitian ini menggunakan tingkat signifikansi sebesar 0,05. Dengan tingkat signifikansi 5% maka kriteria pengujian dalam penelitian ini adalah (Ghozali, 2018:98).

a. Apabila $t_{sig} < 0,05$ dan $t_{hitung} > t_{tabel}$, artinya terdapat pengaruh yang signifikan antara variabel independen terhadap variabel dependen.

b. Apabila $t_{sig} > 0,05$ dan $t_{hitung} < t_{tabel}$, artinya tidak terdapat pengaruh yang signifikan antara variabel independen terhadap variabel dependen.

5. Uji F

Widarjono (2010: 19) menjelaskan bahwa untuk uji signifikansi pengaruh semua variabel independen secara serentak terhadap

variabel dependen dilakukan dengan uji F. Dalam hal ini berarti untuk menguji signifikansi variabel independen (Pendapatan Asli Daerah, dan Belanja Modal) secara bersama-sama terhadap variabel dependen (Kinerja Keuangan pemerintahan daerah) dilakukan dengan uji F. Supriyadi (2014:58) menjelaskan bahwa untuk menguji signifikansi seluruh variabel independen terhadap variabel dependen

dilakukan dengan melihat nilai signifikan dengan uji F pada tabel ANOVA dan membandingkan dengan nilai alpha (α) yang ditentukan (umumnya nilai α yang digunakan 0,01; 0,05; 0,10).

Uji F digunakan untuk mengetahui signifikansi regresi berganda . Hasil perhitungan tersebut kemudian dilihat dengan tabel pada taraf signifikansi 5%. Apabila lebih besar daripada dengan signifikansi 5% maka terdapat pengaruh yang signifikan antara variabel independen terhadap variabel dependen. Apabila lebih kecil daripada maka tidak terdapat pengaruh yang signifikan antara variabel independen dengan variabel dependen. Pengambilan kesimpulan H_0 signifikan atau tidak ditentukan dengan menggunakan kriteria sebagai berikut:

- a) Tingkat sig $F < \alpha = 0,05$ maka Pendapatan Asli Daerah, Belanja Modal secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen (Kinerja Keuangan).
- b) Tingkat sig $F > \alpha = 0,05$ maka Pendapatan Asli Daerah, Belanja Modal secara bersama-sama tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen (Kinerja Keuangan).

3.8 Alat Analisis

Penelitian ini menggunakan teknik analisis regresi linier berganda melalui program SPSS versi 23. Ada beberapa tahapan analisis yang dilalui dalam teknik analisis data yaitu analisis statistik deskriptif. Data yang dianalisis menggunakan statistik deskriptif yang digunakan untuk menganalisis data dalam penelitian seperti nilai minimum, nilai maksimum, nilai rata-rata, *mean*, dan *standard deviation*

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Umum Obyek Penelitian

4.1.1 Sejarah Singkat BPKAD Kota Palopo

pada awal dibentuknya Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) berdasarkan peraturan daerah kota Palopo Nomor 02 Tahun 2018 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Palopo. Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah mempunyai tugas melakukan urusan pemerintah daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan dibidang Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang menjadi tanggung jawab dan kewenangannya. Setelah adanya peraturan daerah kota Palopo Nomor 08 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah, Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Berubah Menjadi Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah (BPKAD).

4.1.2 Tugas Dan Fungsi BPKAD Kota Palopo

Secara umum kepala badan mempunyai tugas dan pokok membantu walikota dalam melaksanakan penyelenggaraan urusan pemerintah dibidang pengelolaan keuangan dan aset daerah. sedangkan berdasarkan fungsinya badan pengelolaan keuangan dan aset daerah menyelenggarakan:

1. Perumusan Kebijakan Teknis Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah.
2. Pelaksanaan Fungsi Bendahara Umum Daerah (BUD),

3. Penyelenggaraan Kegiatan Teknik Operasional Dan Fungsional Dibidang Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah,
4. Pengoordinasian Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah,
5. Pembinaan Dan Pelaksanaan Tugas Dibidang Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah,
6. Pelaksanaan Tugas Lain Yang Diberikan Oleh Walikota Sesuai Tugas Dan Fungsinya.

Sesuai dengan tugas dan fungsinya berdasarkan peraturan walikota palopo nomor 57 tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan aset Daerah Kota Palopo, maka Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kota Palopo bertugas untuk menyelenggarakan fungsi pengelolaan keuangan daerah yang meliputi penganggaran, penatausahaan, akuntansi, pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan daerah. Dalam menjalankan fungsi tersebut, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah juga berperan sebagai pejabat pengelola keuangan daerah sekaligus bendahara umum daerah, sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

4.1.3 Visi dan misi badan pengelolaan keuangan dan aset daerah (BPKAD)

1. Visi

"Terwujudnya Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang Profesional dan Berkualitas".

2. Misi

- a. Meningkatkan kualitas profesionalisme sumberdaya manusia (SDM) aparat pelaksana pengelola keuangan dan aset daerah,
- b. Meningkatkan kualitas system pengelolaan pendapatan, keuangan dan aset daerah,
- c. Meningkatkan profesionalisme pelayanan pengelolaan keuangan dan manajemen aset daerah.

4.1.4 Struktur organisasi

Gambar 4.1 Struktur Organisasi Badan Pendapatan Daerah Kota palopo



4.2 Deskripsi Data

Penelitian ini menggunakan data sekunder. Populasi pada penelitian ini yaitu Laporan Realisasi APBD pemerintah kota Palopo dan diperoleh sampel yaitu Laporan Realisasi APBD. PAD, Belanja Modal dan Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah kota Palopo selama 10 tahun (2011-2020). Laporan Realisasi APBD bersumber langsung dari kantor BPKAD kota Palopo.

Tabel 4.1
Sampel Penelitian

TAHUN	PAD			BELANJA MODAL		
	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%
2011	37.953.581.200	35.703.421.516	94,07	145.422.961.241	115.120.298.258	79,16
2012	37.653.848.217	36.214.002.330	96,18	104.301.594.113	97.876.593.192	93,84
2013	51.844.238.907	51.663.729.162	99,65	104.903.297.922	93.098.317.679	88,75
2014	77.426.359.235	81.646.676.135	105,45	105.531.784.168	96.423.169.320	91,37
2015	85.337.454.367	92.277.783.805	108,13	229.006.483.891	137.225.875.160	59,92
2016	122.969.650.087	134.110.076.220	109,06	432.200.712.394	353.661.100.667	81,83
2017	175.674.349.722	167.307.131.609	95,24	314.654.433.345	288.566.513.023	91,71
2018	156.111.703.360	139.282.846.484	89,22	253.333.799.313	238.791.510.667	94,26
2019	169.497.871.831	165.664.354.780	97,74	223.028.456.443	198.613.005.502	89,05
2020	173.393.617.952	177.205.052.456	102,20	325.870.177.102	207.967.903.780	63,81

Berdasarkan pada tabel 4.1 di atas menjelaskan pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah dan belanja modal dari tahun 2011-2020. PAD tahun 2011-2016 mengalami peningkatan, namun pada tahun 2017-2018 mengalami penurunan kemudian mengalami peningkatan kembali pada tahun 2019-2020. Sedangkan pada belanja modal mengalami peningkatan dan penurunan yang tidak stabil dari tahun ketahun.

Pengukuran kinerja aparat Badan Pengelola Keuangan Aset Daerah Kota Palopo menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan Realisasi Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (RAPBD) Kota Palopo menggunakan analisis rasio kinerja *value for money*, yaitu:

1. Rasio Ekonomis

Ekonomis (kehematan) sebagai tingkat biaya yang dikeluarkan untuk melaksanakan suatu kegiatan atau memperoleh sesuatu. Tingkat ekonomi dalam mengelola keuangan dengan melihat perbandingan antara anggaran belanja dengan realisasinya dengan presentase tingkat pencapaiannya.

$$RasioEkonomis = \frac{\text{Realisasi Pengeluaran}}{\text{Anggaran Pengeluaran}}$$

Ketentuan :

Jika <100% berarti ekonomis

Jika >100% berarti tidak ekonomis

Jika =100% berarti ekonomis berimbang (Kepmendagri Nomor 690.900.327 tahun 1996)

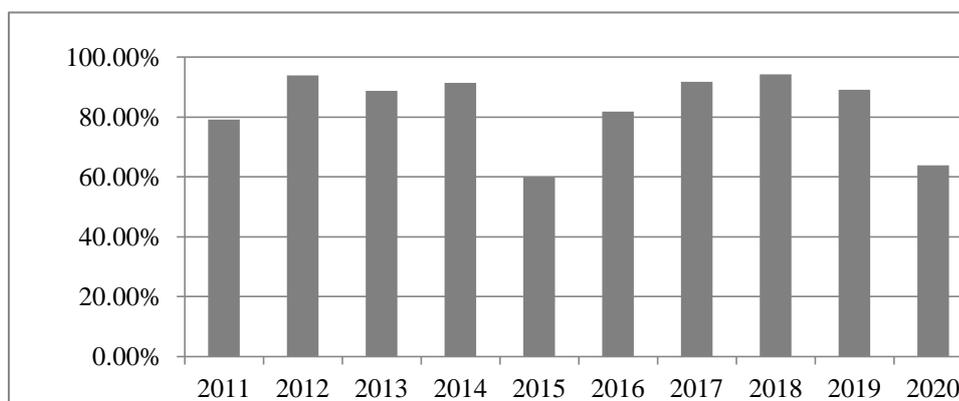
Berikut ini disajikan tabel perhitungan rasio ekonomis untuk Badan Pengelola Keuangan Aset Daerah Kota Palopo untuk tahun anggaran 2011-2020 yang diambil dari APBD dan RAPBD.

Tabel 4. 2 Rasio Ekonomis BPKAD Kota Palopo Tahun 2011-2012

Tahun	Anggaran Pengeluaran	Realisasi Pengeluaran	Rasio Ekonomis	Keterangan
2011	145.422.961.241	115.120.298.258	79,16%	Ekonomis
2012	104.301.594.113	97.876.593.192	93,84%	Ekonomis
2013	104.903.297.922	93.098.317.679	88,75%	Ekonomis
2014	105.531.784.168	96.423.169.320	91,37%	Ekonomis
2015	229.006.483.891	137.225.875.160	59,92%	Ekonomis
2016	432.200.712.394	353.661.100.667	81,83%	Ekonomis
2017	314.654.433.345	288.566.513.023	91,71%	Ekonomis
2018	253.333.799.313	238.791.510.667	94,26%	Ekonomis
2019	223.028.456.443	198.613.005.502	89,05%	Ekonomis
2020	325.870.177.102	207.967.903.780	63,81%	Ekonomis

Sumber : BPKAD Kota Palopo 2011-2020

Berdasarkan tabel diatas ditinjau dari pencapaian ekonomis pada tahun 2011-2020 kinerja aparat Badan Pengelola Keuangan Aset Daerah Kota Palopo dinyatakan ekonomis karena menghasilkan rasio kurang dari 100%.Hal ini dibuktikan rasio ekonomis dari tahun 2011-2020.

Gambar 4. 2 Grafik perkembangan Rasio Ekonomis BPKAD Kota Palopo Tahun 2011-2020

2. Rasio Efisiensi

Efisiensi (daya guna) berhubungan dengan metode operasi (*method operation*). Proses kegiatan operasional dapat dikatakan efisien apabila suatu produk atau hasil karya tertentu mempergunakan sumber daya dan dana yang serendah-rendahnya. Efisiensi merupakan perbandingan antara *output* dan *input*. Tingkat efisiensi dalam mengelola keuangan dengan melihat perbandingan antara realisasi belanja dengan realisasi pendapatan.

$$\text{Rasio Efisiensi} = \frac{\text{Realisasi biaya untuk memperoleh pendapatan}}{\text{Realisasi pendapatan}}$$

Ketentuan :

Jika < 100% berarti efisien

Jika > 100% berarti tidak efisien

Jika = 100% berarti efisien berimbang (Kepmendagri Nomor 690.900.327 tahun 1996)

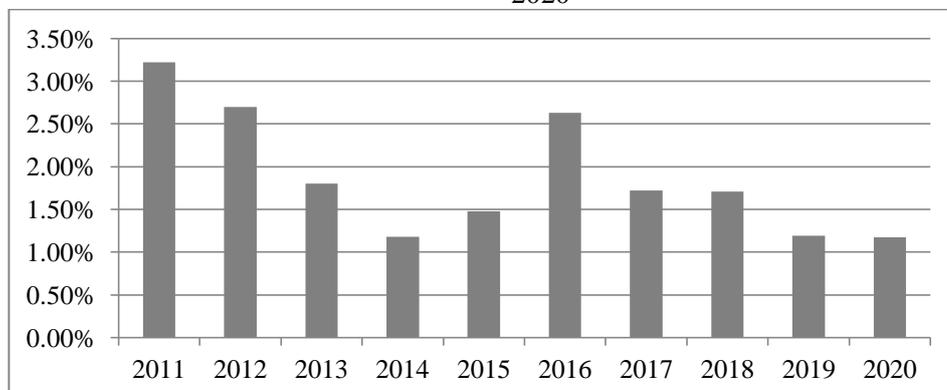
Berikut perhitungan rasio efisiensi untuk Badan Pengelola Keuangan Aset Daerah Kota Palopo untuk tahun anggaran 2011-2020 yang diambil dari APBD dan RAPBD.

Tabel 4. 3 Rasio Efisiensi BPKAD Kota Palopo Tahun 2011-2020

Tahun	Realisasi Belanja	Realisasi Pendapatan	Rasio Efisiensi	Keterangan
2011	115.120.298.258	35.703.421.516	3,22%	Efisien
2012	97.876.593.192	36.214.002.330	2,70%	Efisien
2013	93.098.317.679	51.663.729.162	1,80%	Efisien
2014	96.423.169.320	81.646.676.135	1,18%	Efisien
2015	137.225.875.160	92.277.783.805	1,48%	Efisien
2016	353.661.100.667	134.110.076.220	2,63%	Efisien
2017	288.566.513.023	167.307.131.609	1,72%	Efisien
2018	238.791.510.667	139.282.846.484	1,71%	Efisien
2019	198.613.005.502	165.664.354.780	1,19%	Efisien
2020	207.967.903.780	177.205.052.456	1,17%	Efisien

Sumber : BPKAD Kota Palopo 2011-2020

Pencapaian efisiensi aparat Badan Pengelola Keuangan Aset Daerah Kota Palopo selalu efisien dari tahun 2011-2020 karena menghasilkan rasio kurang dari 100%. Sehingga secara keseluruhan dapat dikatakan apabila kinerja aparat telah efisien, yang berarti aparat mampu menggunakan sumber daya yang diperlukan dengan minimum untuk mencapai target yang optimum.

Gambar 4. 1 Grafik perkembangan Rasio Efisiensi BPKAD Kota Palopo Tahun 2011-2020

3. Rasio Efektivitas

Efektivitas (hasil guna) adalah ukuran keberhasilan suatu organisasi dalam usaha mencapai tujuan organisasi yang telah ditetapkan. Efektivitas merupakan perbandingan *outcome* dan *output*. *Outcome* merupakan dampak suatu program atau kegiatan terhadap masyarakat, sedangkan *output* merupakan hasil yang dicapai dari suatu program aktivitas dan kebijakan. Tingkat efektivitas dalam pengelolaan keuangan dapat dilihat perbandingan realisasi pendapatan dengan anggaran pendapatan.

$$\text{Rasio Efektivitas} = \frac{\text{Realisasi pendapatan}}{\text{Anggaran pendapatan}}$$

Ketentuan :

Jika > 100% berarti efektif

Jika < 100% berarti tidak efektif

Jika = 100% berarti efektif berimbang (Kepmendagri Nomor 690.900.327 tahun 1996)

Perhitungan rasio efektivitas untuk Badan Pengelola Keuangan Aset Daerah Kota Palopo untuk tahun anggaran 2011-2020 yang diambil dari APBD dan RAPBD adalah sebagai berikut.

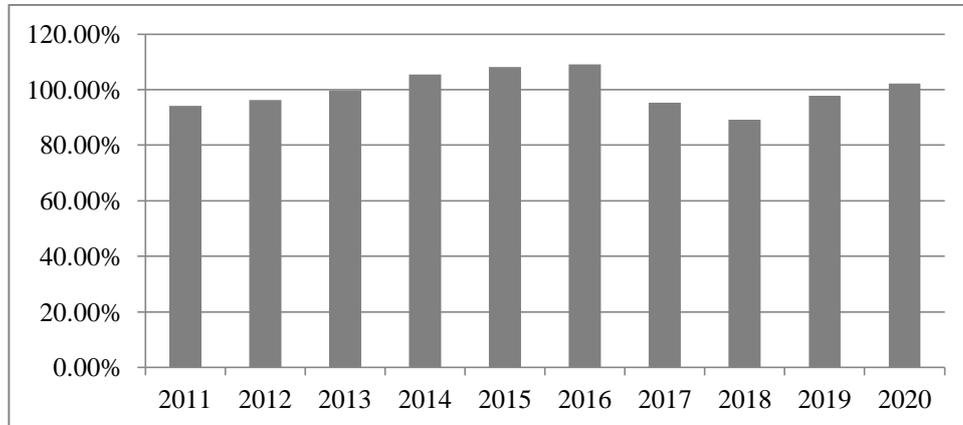
Tabel 4. 4 Rasio Efektivitas BPKAD Kota Palopo Tahun 2011-2020

Tahun	Anggaran Pendapatan	Realisasi Pendapatan	Rasio Efektivitas	Keterangan
2011	37.953.581.200	35.703.421.516	94,07%	Tidak Efektif
2012	37.653.848.217	36.214.002.330	96,18%	Tidak Efektif
2013	51.844.238.907	51.663.729.162	99,65%	Tidak Efektif
2014	77.426.359.235	81.646.676.135	105,45%	Efektif
2015	85.337.454.367	92.277.783.805	108,13%	Efektif
2016	122.969.650.087	134.110.076.220	109,06%	Efektif
2017	175.674.349.722	167.307.131.609	95,24%	Tidak Efektif
2018	156.111.703.360	139.282.846.484	89,22%	Tidak Efektif
2019	169,497.871.831	165.664.354.780	97,74%	Tidak Efektif
2020	173.393.617.952	177.205.052.456	102,20%	Efektif

Sumber :BPKAD Kota Palopo 2011-2020

Kinerja aparat Badan Pengelola Keuangan Aset Daerah Kota Palopo pada tahun 2011, 2012,2013,2017,2018 dan 2019 tidak efektif karena menghasilkan rasio kurang dari 100%. Pada tahun 2014,2015,2016 dan 2020 kinerjanya efektif karena menghasilkan rasio lebih dari 100% . Salah satu penyebab kinerja aparat tidak efektif karena pendapatan pajak daerah, pendapatan retribusi daerah dan lain-lain pendapatan asli daerah jauh lebih kecil dibandingkan dengan anggaran yang telah ditetapkan.

Gambar 4.4 Grafik perkembangan Rasio Efektivitas BPKAD Kota Palopo Tahun 2011-2020



4.2.1 Uji statistik deskriptif

Statistik deskriptif berfungsi untuk memberi gambaran terhadap objek yang diteliti melalui data sampel atau populasi sebagaimana adanya tanpa melakukan analisis dan membuat kesimpulan yang berlaku umum.

Analisis statistik deskripsi ini meliputi standar deviasi, *mean*, nilai maksimum, nilai minimum dan jumlah penelitian sehingga penelitian ini menggunakan statistik deskriptif. Dari hasil pengumpulan data sekunder tentang Pendapatan Asli daerah, Belanja Modal dan Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah kota Palopo tahun 2011-2020 maka statistik deskriptif yaitu *mean*, nilai maksimum, nilai minimum, dan standar deviasi adalah sebagai berikut:

Tabel 4.5
Uji Statistik Deskriptif

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Pendapatan Asli Daerah	10	3570342151600.00	17720505245665.00	10810750744993.3000	5556535275183.37000
Belanja Modal	10	9309831767900.00	35366110066741.00	18273442872500.0000	9053877523477.99000
Kinerja Keuangan	10	5992.00	9426.00	8337.0000	1236.28799
Valid N (listwise)	10				

Berdasarkan tabel 4.5 menunjukkan bahwa sampel berjumlah 20 (N) pada tiap-tiap variabel yang diteliti. Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah sebagai variabel dependen memiliki nilai minimum sebesar 5992,00 persen dengan nilai maksimum sebesar 9426,00 Persen sedangkan nilai rata-ratanya (*mean*) sebesar 8337,0000 Persen dengan standar deviasi sebesar 1236,28799 Persen standar deviasi memiliki nilai yang lebih besar dibandingkan dengan nilai *mean*, hal ini berarti bahwa simpangan data pada variabel Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah tidak terlalu besar. Oleh karena itu dapat dikatakan bahwa deviasi antara nilai minimum dan nilai maksimum pada periode pengamatan relatif rendah, sehingga dapat dikatakan baik karena tidak ada kesenjangan yang relatif besar antara nilai minimum dan maksimum Belanja Daerah.

Pendapatan asli daerah memiliki nilai minimum sebesar 3.570.342.151.600,00 dengan nilai maksimum 17.720.505.245.665,00 sedangkan nilai *mean* sebesar 10.810.750.744.993,3000 dengan standar deviasi sebesar 5.556.535.275.183,37000 standar deviasi memiliki nilai yang lebih kecil daripada nilai *mean*, hal ini berarti bahwa simpangan pada data tidak terlalu besar dari pendapatan asli daerah terendah dan tertinggi.

Belanja modal memiliki nilai minimum sebesar 9.309.831.767.900,00 dengan nilai sebesar 35.366.110.066.741,00 sedangkan nilai *mean* sebesar 18.273.442.872.500,0000 dengan standar deviasi sebesar 9.053.877.523 477,99000 Standar deviasi memiliki nilai yang lebih kecil daripada *mean*, dalam hal ini simpangan pada data tidak terlalu besar dari Belanja modal terendah dan tertinggi.

4.2.2 Uji Asumsi Klasik

1. Uji Normalitas

Uji normalitas adalah sebuah uji yang dilakukan dengan tujuan untuk menilai sebaran data pada sebuah kelompok data atau variabel, apakah sebaran data tersebut berdistribusi normal atau tidak. Sebaran data berdistribusi normal jika digambarkan dalam bentuk kurva akan membentuk lonceng (*bell-shaped curve*) yang kedua sisinya melebur sampai tidak terhingga. Untuk mendeteksi apakah data yang digunakan berdistribusi normal atau tidak, maka dalam penelitian ini digunakan metode uji normalitas *Kolmogorov-Smirnov Text* dengan ketentuan jika nilai probabilitas (*Asymp.Sig*) > 0,05 maka data berdistribusi normal. Berikut hasil pengolahan data menggunakan program SPSS versi 23 yang disajikan dalam bentuk tabel sebagai berikut :

Tabel 4.6
Hasil Uji Normalitas

		Unstandardized Residual
N		10
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	0.0000000
	Std. Deviation	1206.89925042
Most Extreme Differences	Absolute	0.252
	Positive	0.177
	Negative	-0.252
Test Statistic		0.252
Asymp. Sig. (2-tailed)		.072 ^c

Sumber: Data sekunder diolah, 2022

Berdasarkan tabel 4.6 maka dapat diketahui bahwa nilai probabilitas *Asymp.Sig* (2-tailed) sebesar 0,072 lebih besar dari 0,05. Maka sesuai dengan dasar pengambilan keputusan dalam uji normalitas Kolmogorov-Smirnov Test dalam hal ini data berdistribusi normal.

2. Uji Multikolinieritas

Uji multikolinieritas digunakan untuk menguji apakah dalam model regresi yang terbentuk terdapat korelasi yang tinggi antar variabel bebas atau tidak. Uji ini dilakukan dengan melihat nilai tolerance dan VIF dari masing-masing variabel bebas terhadap variabel terikat. Apabila nilai tolerance diatas 0,10 dan nilai VIF dibawah 0,10 maka model tersebut tidak mengandung multikolinearitas. Hasil pengolahan data dengan program SPSS versi 23 adalah sebagai berikut :

Tabel 4.7
Hasil Uji Multikolinieritas

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.	Collinearity Statistics	
	B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1 (Constant)	8480.207	1058.834		8.009	0.000		
Pendapatan Asli Daerah	-7.341E-11	0.000	-0.330	-0.587	0.576	0.485	2.324
Belanja Modal	3.559E-11	0.000	0.261	0.463	0.096	0.657	2.324
a. Dependent Variable: Kinerja Keuangan							

Sumber: Data sekunder diolah, 2022

Berdasarkan tabel 4.7, maka dapat disimpulkan bahwa model regresi tidak mengalami gangguan multikolinieritas, hal ini sesuai dengan dasar pengambilan keputusan dalam uji multikolinieritas dengan melihat nilai Tolerance dan VIF. Berdasarkan outputnya nilai tolerance masing-masing variabel Pendapatan asli daerah (X1) dan belanja modal (X2) sebesar $0,485 > 0,10$. Sementara nilai VIF untuk masing-masing variabel adalah $2,324 < 0,10$ yang artinya bahwa tidak terjadi gejala multikolinieritas.

3. Uji Autokorelasi

Uji ini digunakan untuk menghindari adanya autokorelasi pada suatu penelitian. Adanya autokorelasi akan menyebabkan penaksiran yang tidak efisien. Model regresi yang baik adalah bebas dari autokorelasi. Untuk mendeteksi masalah autokorelasi dalam penelitian ini menggunakan metode Durbin-Watson (Durbin Watson test) dengan ketentuan jika nilai DW berada diantara nilai dU dan $4-dU$ ($dU < DW < 4-dU$) maka tidak terjadi autokorelasi. Jika nilai DW dibawah

dL ($DW < dU$) dan jika nilai DW diatas $4-dL$ maka terjadi autokorelasi. Berikut hasil pengolahan data :

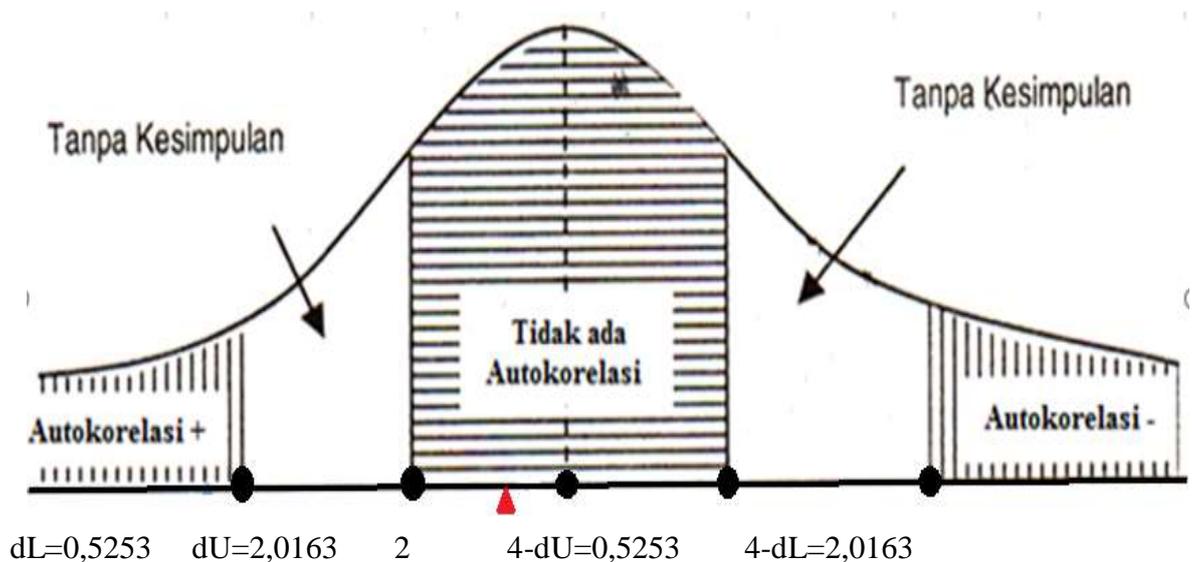
Tabel 4.8
Hasil Uji Autokorelasi

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.217 ^a	0.047	-0.225	1368.49512	1.858
a. Predictors: (Constant), Belanja Modal, Pendapatan Asli Daerah					
b. Dependent Variable: Kinerja Keuangan					

Sumber: Hasil olah data SPSS 2022

Berdasarkan hasil uji autokorelasi menghasilkan nilai Durbin-Watson (DW) sebesar 1,858. Nilai tabel dengan menggunakan alpha 5% atau 0,05 dengan jumlah sampel sebanyak 10 dan jumlah variabel independent 2, maka pada tabel Durbin-Watson diperoleh $dL = 0,5253$ dan $dU = 2,0163$.

Gambar 4.5 Kurva Durbin-Watson



Berdasarkan pada gambar kurva diatas terlihat bahwa nilai DW sebesar 1,858 terletak diantara du dan $4-du$, maka dapat disimpulkan tidak terdapat autokorelasi.

4. Uji Heteroskedastisitas

Pengujian ini digunakan untuk melihat apakah dalam sebuah model regresi terjadi ketidaksamaan varian dari residual dari suatu pengamatan ke pengamatan yang lain. Jika dalam model regresi terdapat nilai yang sama (konstan/tetap) maka disebut homokedastisitas. Yang diharapkan dalam suatu model regresi adalah adanya homokedastisitas. Untuk mengetahui ada tidaknya heterokedastisitas pada model regresi digunakan uji gletser. Uji ini dilakukan dengan meregresi nilai absolut residual terhadap variabel independent. Ketentuannya yaitu, apabila nilai probabilitas lebih besar dari alpha ($\text{Sig} > 0,05$) maka tidak terjadi heterokedastisitas, dan sebaliknya. Berikut hasil pengolahan data menggunakan SPSS versi 23 adalah :

Tabel 4.9
Hasil Uji Heteroskedastisitas

Model		Unstandardized	Std.Error	Standardized	T	Sig.
		Coefficients		Coefficients		
		B		Beta		
1	(Constant)	8480.207	1058.834		8.009	0.000
	Pendapatan Asli Daerah	-7.341E-11	0.000	-0.330	-0.587	0.576
	Belanja Modal	3.559E-11	0.000	0.261	0.463	0.657

a. Dependent Variable: Kinerja Keuangan

Sumber: Hasil olah data SPSS 2022

Berdasarkan hasil output diatas diketahui nilai signifikan (sig) variabel pendapatan asli daerah (X1) adalah $0,576 > 0,05$ dan variabel belanja modal (X2) adalah $0,657 > 0,05$ maka sesuai dengan dasar pengambilan keputusan dalam uji gletser, dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi gejala heteroskedastisitas.

4.2.3 Uji Regresi Berganda

Metode analisis data yang digunakan untuk menguji hipotesis pada penelitian ini adalah dengan menggunakan metode regresi linier berganda, hal ini dilakukan karena peneliti berusaha menjelaskan pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Untuk mengetahui bahwa pendapatan asli daerah dan belanja modal berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan di Kota Palopo maka penulis telah menganalisis dengan metode regresi linear berganda, dengan menggunakan bantuan program SPSS versi 23, maka hasil persamaan regresi yang diperoleh adalah sebagai berikut:

Tabel 4.10
Hasil Uji Analisis Linear Berganda

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	8480.207	1058.834		8.009	0.000
	Pendapatan Asli Daerah	-7.341E-11	0.000	-0.330	-0.587	0.576
	Belanja Modal	3.559E-11	0.000	0.261	0.463	0.657

a. Dependent Variable: Kinerja Keuangan

Sumber: Hasil olah data SPSS 2022

Berdasarkan hasil analisis pada tabel 4.10 diatas maka model untuk menguji Pengeluaran Pemerintah dan Investasi Swasta mempengaruhi pertumbuhan Ekonomi selama periode 2011-2020 adalah sebagai berikut:

$$Y = 8480.207 - 7,34 + 3,55 + e$$

Interpretasi dari persamaan regresi linear berganda diatas adalah sebagai berikut:

4. Nilai konstanta (a) diperoleh sebesar 8480,207 artinya adalah variabel pendapatan asli daerah dan belanja modal berpengaruh terhadap kinerja

keuangan Kota Palopo dengan nilai konstan atau sama dengan nol (0), maka kinerja keuangan nilainya sebesar 8480,207 (dalam persen).

5. Nilai koefisien regresi variabel pendapatan asli daerah (X1) sebesar 7,34 artinya bahwa setiap kenaikan satu satuan, maka akan diikuti penurunan jumlah kinerja keuangan sebesar -7,34 atau -7.341E-11 dengan asumsi variabel lain bernilai tetap.
6. Nilai koefisien regresi variabel belanja modal (X2) sebesar 3,55 artinya bahwa setiap kenaikan satu persen, maka akan diikuti dengan kenaikan jumlah kinerja keuangan sebesar 3,55 atau 3.559E-11 dengan asumsi variabel lain bernilai tetap.

4.3.3 Uji Hipotesis

1. Koefisien Determinan (R²)

Koefisien determinasi digunakan untuk mengetahui seberapa jauh variabel independent menerangkan variabel dependent yang dilihat melalui nilai R Square. Berikut hasil pengolahan data menggunakan program SPSS versi 23 adalah sebagai berikut.

Tabel 4.11
Hasil Uji Koefisien Determinasi (R²)

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin Watson
1	.217 ^a	0.047	-0.225	1368.49512	1.858
a. Predictors: (Constant), Belanja Modal, Pendapatan Asli Daerah					
b. Dependent Variable: Kinerja Keuangan					

Sumber: Hasil olah data SPSS 2022

Hasil pengujian koefisien determinasi pada tabel 4.11 di atas menunjukkan bahwa nilai *Adjusted R²* diperoleh sebesar -0.225. Hal ini dapat disimpulkan bahwa

kinerja keuangan pemerintah daerah dapat dijelaskan oleh variabel bebasnya (independen), yakni: pendapatan asli daerah dan Belanja Modal yang diharapkan sebesar -22,5%. Maka sisanya sebesar 99,775% dijelaskan oleh variabel lain diluar model penelitian ini.

2. Uji Parsial (t)

Uji digunakan untuk mengetahui pengaruh masing-masing variabel bebas terhadap variabel terikat. Uji ini dilakukan dengan membandingkan tHitung dan t tabel dengan tingkat signifikan sebesar 5% dengan derajat kebebasan $df = (n-k-1)$ dimana n adalah jumlah sampel dan k adalah jumlah variabel. Kriteria pengujian yang digunakan yakni, jika $t_{Hitung} > t_{Tabel}$ maka H_0 ditolak dan jika $t_{Hitung} < t_{Tabel}$ maka H_1 diterima.

Tabel 4.12
Hasil Uji Parsial (t)

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	8480.207	1058.834		8.009	0.000
	Pendapatan Asli Daerah	-7.341E-11	0.000	-0.330	-0.587	0.576
	Belanja Modal	3.559E-11	0.000	0.261	0.463	0.657
a. Dependent Variable: Kinerja Keuangan						

Sumber: Hasil olah data SPSS 2022

1. Uji hipotesis Pendapatan asli daerah (X1) terhadap kinerja keuangan

Berdasarkan output tabel 4.12 dapat diketahui bahwa nilai t Hitung sebesar -0,587 dan nilai t Tabel sebesar 2,306 sedangkan nilai signifikannya sebesar 0,576 artinya bahwa nilai t Hitung < t Tabel dan signifikansi > 0,05 sehingga dapat

disimpulkan bahwa variabel pendapatan asli daerah berpengaruh negative dan tidak signifikan terhadap kinerja keuangan.

2. Uji hipotesis belanja modal (X2) terhadap kinerja keuangan

Berdasarkan output tabel 4.12 dapat diketahui bahwa nilai t Hitung sebesar 0,463 dan nilai t Tabel sebesar 2,306 sedangkan nilai signifikannya sebesar 0,657 artinya bahwa nilai t Hitung < t Tabel dan signifikansi $0,657 > 0,05$ sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel belanja modal berpengaruh negative dan tidak signifikan terhadap kinerja keuangan.

3. Uji Simultan (F)

Pengujian ini dilakukan untuk mengetahui pengaruh seluruh variabel independen secara simultan atau bersama-sama terhadap variabel dependent dengan taraf signifikan 5% dengan ketentuan jika nilai sig < 0,05 maka variabel independen berpengaruh secara simultan terhadap variabel dependent.

Tabel 4.13
Hasil Uji Simultan (F)

Model		Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	646219.794	2	323109.897	0.173	.845 ^b
	Residual	13109452.206	7	1872778.887		
	Total	13755672.000	9			
a. Dependent Variable: Kinerja Keuangan						
b. Predictors: (Constant), Belanja Modal, Pendapatan Asli Daerah						

Sumber: Hasil olah data SPSS 2022

Berdasarkan tabel diatas diperoleh nilai F Hitung sebesar 0,173 dan F Tabel pada tingkat signifikan 5% sebesar 5,32 sedangkan nilai signifikannya sebesar 0,845, maka dapat disimpulkan bahwa nilai F Hitung sebesar $0,173 < F$ Tabel sebesar

5,32 dan nilai sig $0,845 > 0,05$ sehingga variabel pendapatan asli daerah dan belanja modal tidak simultan terhadap kinerja keuangan Kota Palopo.

4.3 Hasil Dan Pembahasan

Berdasarkan Uji parsial (Uji T) di dapatkan nilai t hitung PAD sebesar $0,587 < \text{nilai t tabel sebesar } 2,306$ dengan nilai signifikansi sebesar $0,576 > 0,05$ yang berarti H_1 ditolak, artinya Kinerja keuangan tidak dipengaruhi secara signifikan oleh PAD.

Penelitian ini sejalan dengan penelitian Mulyani (2017) yang menunjukkan kinerja keuangan dapat dipengaruhi secara negatif oleh PAD. Berdasarkan data penelitian, tingkat penerimaan pendapatan asli daerah di BPKAD Kota Palopo masih tergolong rendah sehingga pengelolaan PAD sebagai input dalam pencapaian target pmda di BPKAD Kota Palopo dinilai kurang efisien serta tanggungjawab pemerintah daerah dalam pengelolaan potensi dan sumberdaya daerah melalui pajak dan retribusi masih rendah.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Iqlima Azhar, 2021). Pendapatan asli daerah (PAD) mempunyai nilai signifikan sebesar $0,168$ yang berarti diatas $0,05$ ($t_{sig} > 0,05$), sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel pendapatan asli daerah tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. yang berarti hipotesis ditolak. Hasil ini memberikan arti bahwa tingginya kemampuan daerah dalam menghasilkan dan mengelola pendapatan asli daerah, maka tidak akan tinggi pula tindakan dan keputusan dalam hal menggunakan pendapatan asli daerah tersebut yang telah disesuaikan dengan kebutuhan dan pembangunan daerah. Peningkatan PAD yang tinggi

dihasilkan oleh pajak daerah yang dinilai paling strategis untuk bisa meningkatkan target PAD seperti pajak restoran dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan/BPHTB. Hasil inilah yang membuktikan bahwa semakin tinggi penerimaan PAD suatu daerah tidak dapat mempengaruhi peningkatan kinerja keuangan daerah tersebut.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Putri & Darmayanti, (2019). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa PAD berpengaruh negative signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah kabupaten/kota di wilayah Sarbagita Provinsi Bali tahun 2012-2016. PAD merupakan sumber pendapatan utama pemerintah daerah yang diperoleh dari sumber-sumber di dalam daerah itu sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai perundang-undangan yang berlaku. PAD yang tinggi menunjukkan tingginya tingkat kemampuan sumber daya keuangan suatu daerah yang nantinya akan digunakan sebagai modal dasar pemerintah daerah dalam membiayai pembangunan dan untuk memperkecil ketergantungan dana dari pemerintah pusat. Hasil penelitian ini yang menunjukkan adanya pengaruh negatif signifikan antara PAD terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah bermakna bahwa perolehan kekayaan daerah berupa PAD oleh pemerintah daerah belum optimal sehingga tidak serta merta dapat meningkatkan kinerja keuangan pemerintah daerah tersebut. Di wilayah Sarbagita sendiri, rata-rata kontribusi PAD terhadap total pendapatan selama tahun 2012-2016 tidak mencapai setengah dari total pendapatan, yaitu sebesar 41,545 persen, maka dapat dikatakan bahwa kemampuan pemerintah daerah dalam pelaksanaan desentralisasi untuk

meningkatkan kinerja keuangannya masih kurang sehingga pemerintah daerah tersebut dapat dikatakan belum mampu untuk menggali potensi-potensi daerah guna memperoleh PAD yang lebih besar.

Pendapatan asli daerah tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah di kantor BPKAD Kota Palopo karena tingkat penerimaan pendapatan asli daerah di kantor BPKAD Kota palopo masih tergolong rendah sehingga pengelolaan PAD dalam pencapaian target pemerintah daerah di kantor BPKAD Kota Palopo dinilai masih kurang efisien serta tanggung jawab pemerintah daerah dalam pengelolaan potensi dan sumberdaya daerah melalui pajak dan retribusi masih rendah.

Hasil penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian yang di lakukan oleh Tri Yuni Pratiwi bahwa variabel Pendapatan Asli Daerah (PAD) berpengaruh positif terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten dan Kota di Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2012-2016. Hal ini ditunjukkan dengan hasil analisis yang menggunakan regresi sederhana diperoleh persamaan garis regresi satu prediktor $Y = 76,341 + 0,00006 X_1$. Artinya nilai konstanta α yaitu 76,341 dan nilai Pendapatan Asli Daerah (b/koeffisien regresi) sebesar 0,00006 menunjukkan Pendapatan Asli Daerah berpengaruh positif terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah. Koeffisien korelasi sebesar () sebesar 0,733 dan koeffisien determinasi () sebesar 0,537289. Hal ini menunjukkan bahwa 53,8 % Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah (Y) dipengaruhi oleh variabel Pendapatan Asli Daerah (X_1), sementara 46,2% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak dianalisis dalam uji hipotesis ini. Nilai signifikansi variabel Pendapatan Asli

Daerah lebih kecil dari 0,05 yaitu sebesar 0,000; Nilai thitung sebesar 14,146 lebih besar dari ttabel sebesar 1,9739 sehingga pengaruh variabel Pendapatan Asli Daerah (X1) terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah (Y) adalah positif dan signifikan.

Ni Putu Gina Sukma Antari dan Ida Bagus Panji Sedana (2018), menunjukkan bahwa pendapatan asli daerah berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah Kabupaten/Kota Provinsi Bali periode 2011-2015. Hasil ini memberikan indikasi bahwa pendapatan asli daerah yang dihasilkan Kabupaten/Kota Provinsi Bali tahun 2011-2015 memberikan kontribusi terhadap pertumbuhan pendapatan Kabupaten/Kota Provinsi Bali Tahun 2011-2015. Tinggi pendapatan asli daerah yang mampu dihasilkan daerah dapat meminimalkan ketergantungan daerah terhadap bantuan pendanaan yang bersumber dari pusat. Mahmudi (2009:18) berpendapat bahwa tingginya kemampuan daerah dalam menghasilkan pendapatan asli daerah, maka akan tinggi pula keputusan atau tindakan daerah dalam hal menggunakan pendapatan asli daerah tersebut yang disesuaikan dengan kebutuhan dan pembangunan daerah. Peningkatan pendapatan daerah dapat menyebabkan terjadinya peningkatan kemampuan pemerintah daerah untuk membiayai sendiri segala kegiatan daerahnya sehingga memberikan indikasi bahwa pemerintah daerah telah memiliki kinerja yang baik.

Hasil penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian yang di lakukan oleh Ni Made Diah Permata Sari dan I Ketut Mustanda (2019), menunjukkan bahwa Pendapatan asli daerah berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan pemerintah

daerah di Kabupaten Badung. Besarnya pendapatan asli daerah yang diterima Kabupaten Badung memberikan dampak terhadap peningkatan kinerja keuangan pemerintah daerah di Kabupaten Badung. Hasil ini memberikan arti bahwa pendapatan asli daerah yang dihasilkan mampu memberikan kontribusi terhadap peningkatan kinerja keuangan pemerintah daerah periode 2013 - 2017.

Pendapatan Asli daerah berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah di Kantor BPKAD Kota palopo karena Peningkatan Pendapatan Asli Daerah mengakibatkan peningkatan Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah. Hal tersebut menunjukkan kemampuan suatu daerah dalam pemilikan potensi, penggalian, dan pengelolaan potensi yang baik sehingga semakin besar kontribusi Pendapatan Asli Daerah serta memaksimalkan penerimaan daerah sehingga menunjukkan semakin besar kemampuan daerah dalam melaksanakan otonomi daerah Dengan pemahaman bahwa Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah menunjukkan kemandirian keuangan pemerintah daerah dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintahannya akan semakin meningkat, dan tidak lagi bergantung kepada bantuan dari pemerintah pusat.

Berdasarkan Uji parsial (Uji T) didapatkan nilai t hitung belanja modal sebesar $0,643 < \text{nilai } t \text{ tabel sebesar } 2,306$ dengan nilai signifikansi sebesar $0.657 > 0,05$. yang berarti H_2 ditolak, artinya Kinerja keuangan tidak dipengaruhi secara signifikan oleh belanja modal. Berdasarkan hasil uji hipotesis yang telah dilakukan menunjukkan bahwa belanja modal berpengaruh negatif signifikan terhadap kinerja keuangan Badan Pengelola Keuangan Aset Daerah Kota Palopo periode 2011-2020.

Hasil penelitian ini senada dengan hasil penelitian yang dilakukan Ni Putu Gina Sukma Antari (2018) yang mendapatkan hasil bahwa belanja modal berpengaruh negatif tidak signifikan terhadap pertumbuhan kinerja keuangan daerah secara langsung dikarenakan kinerja dari pegawai kurang maksimal dan anggaran belanja modal sering digunakan untuk kepentingan pribadi sehingga menimbulkan tindakan korupsi.

Hasil penelitian ini senada dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Fajar Nugroho dan Abdul Rohman, (2012). Salah satu faktor yang menyebabkan komponen belanja modal tidak berpengaruh terhadap pertumbuhan kinerja keuangan pemerintah daerah adalah banyaknya korupsi yang dilakukan. Besarnya dana untuk meningkatkan pembangunan daerah menjadi sebuah kesempatan bagi sejumlah oknum untuk melakukan tindakan korupsi. Korupsi tersebut akan merugikan pemerintah dan menyebabkan menurunnya Kinerja pemerintah dimata masyarakat.

Hasil penelitian ini senada dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Putri & Darmayanti, (2019), menunjukkan bahwa belanja modal berpengaruh negatif signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah Kabupaten/Kota Provinsi Bali periode 2011-2015. Hasil penelitian ini mengindikasikan bahwa kegiatan belanja modal yang dilakukan oleh pemerintah daerah Kabupaten/Kota Provinsi Bali periode 2011-2015 belum sepenuhnya mampu memberikan kontribusi terhadap pertumbuhan pendapatan daerah Kabupaten/Kota Provinsi Bali tahun 2011-2015. Belanja modal dapat dikatakan sebagai suatu kegiatan investasi pemerintah daerah, namun walaupun demikian kegiatan belanja modal

pada pemerintah daerah tidak bertujuan untuk mencari profit. Kegiatan belanja modal dapat menambah aktiva tetap yang dimiliki daerah dan mampu menghasilkan sumber-sumber keuangan dalam jangka panjang. Berdasarkan pernyataan tersebut maka mengindikasikan bahwa kegiatan belanja modal yang dilakukan pemerintah pada saat ini akan menghasilkan sumber-sumber keuangan beberapa tahun kemudian sehingga sumber-sumber keuangan yang dihasilkan melalui kegiatan belanja modal tersebut mampu memberikan kontribusi terhadap pertumbuhan pendapatan daerah beberapa tahun kemudian. Faktor lain yang menyebabkan belanja modal berpengaruh negatif signifikan terhadap pertumbuhan kinerja keuangan pemerintah daerah adalah karena tidak semua kegiatan belanja modal mampu menghasilkan sumber-sumber keuangan secara langsung bagi daerahnya. Keberhasilan dari setiap kegiatan belanja modal tidak hanya diukur dari segi pertumbuhan pendapatan daerah tetapi juga dari segi mutu yang diberikan sesuai dengan yang diharapkan, sesuatu yang dihasilkan sesuai dengan jumlah yang dibutuhkan, pelaksanaan kegiatan belanja modal sesuai dengan waktu yang telah ditentukan, kegiatan belanja modal mengarah pada kepentingan publik, dan biaya yang dikeluarkan untuk kegiatan belanja modal semestinya tidak melebihi anggaran yang sudah ditetapkan sebelumnya sehingga hal tersebut berdampak pada kesejahteraan masyarakat.

Belanja modal tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah di kantor BPKAD Kota Palopo dikarenakan kinerja dari pegawai kurang maksimal dan anggaran belanja modal sering digunakan untuk kepentingan pribadi sehingga menimbulkan tindakan korupsi dan dikarenakan besarnya dana

untuk meningkatkan pembangunan daerah menjadi sebuah kesempatan bagi sejumlah oknum untuk melakukan tindakan korupsi. Korupsi tersebut akan merugikan pemerintah dan menyebabkan menurunnya Kinerja pemerintah dimata masyarakat. Dan tidak semua kegiatan belanja modal yang di lakukan pemerintah daerah di kantor BPKAD kota palopo belum sepenuhnya mampu memberikan kontribusi terhadap pertumbuhan pendapatan di kantor BPKAD Kota palopo.

Hasil penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian yang di lakukan oleh Tri Yuni Pratiwi (2018), bahwa variabel Belanja Modal berpengaruh positif terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten dan Kota di Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2012-2016. Hal ini ditunjukkan dengan hasil analisis regresi satu prediktor $Y = 80,589 + 0,00003 (X_3)$. Artinya nilai konstanta α yaitu 80,589 dan nilai Belanja Modal (b/koeffisien regresi) sebesar 0,00003 menunjukkan bahwa Belanja Modal (X_3) berpengaruh positif terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah. Koefisien korelasi (r) sebesar 0,368 dan koefisien determinasi (R^2) sebesar 0,135424. Hal ini menunjukkan bahwa 13,5% Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah (Y) dipengaruhi oleh variabel Belanja Modal, sedangkan 86,5 % dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak dianalisis dalam uji hipotesis ini. Nilai signifikansi sebesar 0,000 lebih kecil dari 0,05; dan nilai t_{hitung} sebesar 5,189 lebih besar dari t_{tabel} sebesar 1,9739 sehingga pengaruh Belanja Modal (X_3) terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah (Y) adalah positif dan signifikan.

Hasil penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian yang di lakukan oleh Fajar Nugroho dan Abdul Rohman (2012), menyatakan bahwa Belanja Modal

berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah, karena dalam penelitian ini menunjukkan bahwa pemerintah daerah dengan semakin meningkatnya alokasi Belanja Modal menunjukkan peningkatan investasi yang dilakukan sehingga semakin tinggi Kinerja Keuangan Pemerintah.

Belanja modal berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah di kantor BPKAD Kota palopo karena mampu mengelolah keuangan daerahnya dengan baik, dan dengan adanya infrastruktur yang baik dapat menciptakan efisiensi di berbagai sektor dan produktivitas masyarakat semakin tinggi karena pengalokasian belanja modal berkontribusi terhadap kesejahteraan masyarakat dan kinerja keuangan pemerintah daerah.

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan yang telah dilakukan yaitu mengenai Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah (studi kasus Kantor BPKAD Kota Palopo).maka dapat diberikan kesimpulan sebagai berikut.

Pendapatan Asli Daerah berpengaruh negative dan tidak signifikansi terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah di Kantor BPKAD Kota Palopo. Berdasarkan data penelitian, tingkat penerimaan pendapatan asli daerah di Kantor BPKAD Kota Palopo masih tergolong rendah sehingga pengelolaan PAD dalam pencapaian target pemda di Kantor BPKAD Kota Palopo dinilai kurang efisien serta tanggungjawab pemerintah daerah dalam pengelolaan potensi dan sumberdaya daerah melalui pajak dan retribusi masih rendah.

Belanja modal berpengaruh negatif signifikan terhadap kinerja keuangan BPKAD Kota Palopo. Hasil ini memberikan arti bahwa kegiatan belanja modal yang dilakukan pemerintah daerah BPKAD Kota Palopo belum sepenuhnya mampu memberikan kontribusi terhadap pertumbuhan pendapatan daerah BPKAD Kota Palopo.

Pendapatan asli daerah dan belanja modal secara simultan tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah,karena pengelolaan PAD daerah belum optimal dan tidak serta merta dapat meningkatkan kinerja keuangan pemerintah daerah, dan belum mampu untuk menggali potensi-potensi daerah

guna memperoleh PAD yang lebih besar, dan tidak semua kegiatan belanja modal mampu menghasilkan sumber-sumber keuangan secara langsung bagi daerahnya.

5.2 Saran

Pemerintah Daerah diharapkan bisa lebih inovatif dalam mencari pendapatan untuk daerah dengan mempergunakan Sumber Daya Alam seperti lahan-lahan kosong yang ada di Kota Palopo untuk meningkatkan pendapatan Asli Daerah dan belanja modal secara merata di BPKAD Kota Palopo supaya pertumbuhan pendapatan daerah semakin meningkat.

Penelitian selanjutnya diharapkan menggunakan variabel independen lebih banyak lagi karena masih banyak faktor-faktor lain yang dapat mempengaruhi kinerja keuangan pemerintah daerah dan menggunakan rasio keuangan daerah yang lain.

DAFTAR RUJUKAN

- Abarca, Roberto Maldonado. 2021. “Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Belanja Modal terhadap Pertumbuhan Ekonomi.” *Nuevos Sistemas de Comunicación e Información* 2013–15.
- Abdullah. 2015. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Lokasi Khusus terhadap Kinerja Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota se-Sumatera Bagian Selatan. *Simposium Nasional Akuntansi 18, Universitas Sumatera barat, Medan 16-19 September 2015*
- Antari, (2018). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Belanja Modal Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah. *E-Jurnal Manajemen Unud*, 7 (2), hal.1080-1110.
- Aprilianda, Gusti Made Ayu. 2016. “Analisis Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) Terhadap Kinerja Keuangan Pada Pemerintah Kabupaten Dan Kota Di Propinsi Jawa Timur.” *Forum Bisnis Dan Kewirausahaan Jurnal Ilmiah STIE MDP Hal -39 2(1):39–51*.
- Azhar, I. 2021. "Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Kota Langsa" Universitas Samudra, Langsa, Aceh Timur, Indonesia.
- Batubara, Dian Nofrina. 2009. *Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) Terhadap Kinerja Keuangan pada Pemerintah Kabupaten dan Kota di Propinsi Sumatera Utara*. Skripsi, Universitas Sumatera Utara, Medan (http://repository.usu.ac.id/bitstream/123456789/1_9120/7/Cover.pdf, diakses tanggal 4 Desember 2010).
- Darwanis dan Ryanda Saputra. 2014. Pengaruh Belanja Modal terhadap Pendapatan Asli Daerah dan Dampaknya pada Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah. *Jurnal Dinamika Akuntansi dan Bisnis*, 1 (2): 183-199.
- Dwi Saraswati, Yunita Sari Rioni, S. 2019. “Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Ukuran Pemerintah Daerah, Leverage, Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah.” *Jurnal Akuntansi Bisnis & Publik* 9(2):110–20.
- Fajar Nugroho dan Abdul Rohman. 2012. *Pengaruh Belanja Modal terhadap Pertumbuhan Kinerja Keuangan Daerah dengan Pendapatan Asli Daerah sebagai Variabel Intervening (Studi Kasus di Propinsi Jawa Tengah)*. Diponegoro Journal of Accounting. Vol. 1 No. 2.
- Ghozali. I. 2011. *Aplikasi Analisis Multivariate dengan program SPSS*. Edisi V. Semarang: Badan Penerbit UNDIP.
- Ghozali, Imam. 2018. *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program IBM SPSS 25*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.

- Halim, 2004. *Akuntansi Keuangan Daerah, Akuntansi Sektor Publik*. Jakarta: Salemba Empat.
- Halim, dan Kusufi. 2012. *Pengeluaran Belanja Modal*. Penerbit Buku Kompas. Jakarta.
- Halim, 2007. *Akuntansi Sektor Publik Keuangan Daerah*. Edisi Ketiga. Penerbit Salemba Empat. Jakarta.
- Jauhar, Fauzan. 2016. “Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus Dan Belanja Modal Terhadap Kineja KEuangan Pemerintah Daerah Kab/Kota Sumatera Barat.” *Jurnal Akuntansi* 1(2):61–70.
- Mulyani, Sri dan Hardiyanto Wibowo. 2017. Pengaruh Belanja Modal, Ukuran Pemerintah Daerah, Intergovernmental Revenue dan Pendapatan Asli Daerah terhadap Kinerja Keuangan. *Kompartemen*, 15 (1): 57-66.
- Mahmudi. 2009. *Manajemen Keuangan Daerah*. Jakarta: Erlangga.
- Priyatno, D. 2012. *Cara Kilat Belajar Analisis Data Dengan SPSS 20*. Yogyakarta: Andi Offset.
- Pratiwi, T. Y. (2018). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, Dan Belanja Modal Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Dan Kota Di Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2012-2016. *Program Studi Akuntansi Jurusan Pendidikan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Yogyakarta 2018*.
- Prasasti, S., & Sari, R. (2015). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (Pad) Dan Dana Perimbangan Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Kasus Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Diy Tahun 2007-2013). *Akmenika: Jurnal Akuntansi Dan Manajemen*, 12(1), 1–13.
- Prastiwi, Nanda Dipa, and Andri Waskita Aji. 2020. “Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, Dana Keistimewaan Dan Belanja Modal Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah.” *Kajian Bisnis Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Widya Wiwaha* 28(1):89–105. doi: 10.32477/jkb.v28i1.45.
- Putri, N. K. N. I., & Darmayanti, N. P. A. (2019). Pengaruh Pad Dan Dana Perimbangan Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Di Wilayah Sarbagita Provinsi Bali. *E-Jurnal Manajemen Universitas Udayana*, 8(5), 2834.
- Rochmah, S. N. (2015). *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Empiris pada Kota dan Kabupaten di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2012)* (Doctoral dissertation, Universitas Muhammadiyah Surakarta).

- Sari, Ni Made Diah Permata, and I. Ketut Mustanda. 2019. "Pengaruh Ukuran Pemerintah Daerah, Pendapatan Asli Daerah Dan Belanja Modal Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah." *E-Jurnal Manajemen Universitas Udayana* 8(8):4759. doi: 10.24843/ejmunud.2019.v08.i08.p02.
- Sugiyono. 2018. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sukma, Antari Ni Putu Gina, and Ida Bagus Sedana Panji. 2018. "Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Dan Belanja Modal Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Kasus Pada Kabupaten/Kota Di Provinsi Bali Tahun 2011-2015)." *E-Jurnal Manajemen Unud* 7(2):1080–1110.
- Supriyadi, E. (2014). *SPSS+ Amos Statistika Data Anaylisis*. Jakarta: Penerbit IN MEDIA.
- Verawaty, V., Jaya, A. K., Puspanita, I., & Nurhidayah, N. (2020). Pengaruh PAD dan Dana Perimbangan terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota di Sumatera Selatan. *Mbia*, 19(1), 21–37. <https://doi.org/10.33557/mbia.v19i1.560>
- Widarjono. Agus. (2010). *Analisis Statistika Multivariat Terapan. Edisi pertama*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- Yunus, Muhammad Kafrawi,. 2019. "Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (Pad) Terhadap Kinerja Keuangan Toraja." *Economics Bosowa Journal Edisi Xxix* Januari s/d Maret 2019. 5(001):14–32.